

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS SIM E-PAYMENT & E-REVENUE TERHADAP PENATAUSAHAAN KEUANGAN DENGAN VARIABEL MODERASI KOMITMEN PIMPINAN

Titah Setyawati^{*1}, Dewie Tri Wijayati Wardoyo², Andre Dwijanto Witjaksono³
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹²³
titah.23047@mhs.unesa.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the influence of employee competence and the quality of e-payment and e-revenue information systems on the effectiveness of regional financial administration with leadership commitment as a moderating variable. The location of this research was carried out at the Regional Financial Management Agency (BPKAD) of the Surabaya City Government as the subject of the study. The data collection technique used a research questionnaire with the provision of a population of 140 PPK SKPD treasurer employees and sampling using random sampling of 92 respondents. Testing of research data used the SPSS version 26. Based on the results of the hierarchical regression test in this study, it was found that; (a) employee competence does not have a significant influence on the effectiveness of financial administration, (b) the quality of the e-payment & e-revenue SIM does not have a significant influence on the effectiveness of financial administration, (c) the combination of employee competence and the quality of the e-payment & e-revenue SIM have a significant influence on the effectiveness of regional financial administration, (d) after the moderating variable of leadership commitment to employee competence and the quality of the e-payment & e-revenue SIM there is a significant influence on the effectiveness of regional financial administration.*

Keywords: *e-payment, e-revenue, financial management, leader commitment*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pegawai dan kualitas sistem informasi e-payment dan e-revenue terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner penelitian dengan ketentuan jumlah populasi 140 orang pegawai bendahara PPK SKPD dan pengambilan sample menggunakan random sampling sejumlah 92 responden. Pengujian data penelitian menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan hasil uji regresi hierarki pada penelitian ini didapatkan bahwa; (a) kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan, (b) kualitas SIM e-payment & e-revenue tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan, (c) kombinasi kompetensi pegawai dan kualitas SIM e-payment & e-revenue memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah, (d) setelah adanya variabel moderasi komitmen pimpinan terhadap kompetensi pegawai dan kualitas SIM e-payment & e-revenue terdapat pengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah.

Kata kunci: *e-payment, e-revenue, penatausahaan keuangan, komitmen pimpinan*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat bergantung terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahnya. Secara global berdasarkan laporan kementerian keuangan tahun 2019, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum stabil sejak tahun 2016 – 2019; 2016 (3,4%), 2017 (3,8%), 2018 (3,6%) dan tahun 2019 diproyeksikan menjadi 3,0%, namun sudah ada peningkatan yang signifikan jika ditinjau sejak peristiwa krisis keuangan global tahun 2008 (Kemenkeu, 2020).

Merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan merupakan salah satu bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dibebankan tugas tanggung jawabnya pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) (Kim et al., 1991).

Penatausahaan keuangan daerah bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab bagi satuan unit kerja tertentu, khususnya di Indonesia disebut dengan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) (Tanjung, 2011). Secara garis besar yang menjadi tanggung jawab seorang PPK SKPD adalah dokumen keuangan setiap biro lingkup satuan kerja daerah yang diverifikasi kemudian diusulkan untuk dapat dibayarkan, seluruh transaksi keuangan yang diproses akan dilaporkan sehingga outputnya berupa laporan penatausahaan keuangan

(LRA, LPE, LO dan neraca keuangan) (Anggi et al., 2021; Asmorowati et al., 2019).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki setiap individu, memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam organisasi untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan SDM yang unggul dalam hal ini dianggap sebagai faktor kunci yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah (Heslina & Syahrini, 2021; Sedyastuti et al., 2021).

Sumber daya manusia yang berkompeten mempunyai ciri mampu mengoperasikan *sistem informasi e-payment dan e-revenue* dengan efektif dan efisien, namun hal tersebut jika didukung dengan sistem informasi *e-payment dan e-revenue* yang memadai dan berkualitas (Hermelinda, 2018). Kualitas sistem informasi *e-payment dan e-revenue* yang diterapkan pada instansi pemerintahan melibatkan faktor-faktor seperti keandalan, kecepatan, akurasi, dan relevansi informasi yang disediakan oleh sistem tersebut (Wibowo et al., 2023).

Government Resources Management System (GRMS) merupakan sebuah sistem aplikasi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan sistem pemerintahan suatu kota. Mengkaji berdasarkan penelitian (Asmorowati et al., 2019) bahwasanya GRMS telah diimplementasikan menjadi Smart Governance dalam manajemen keuangan daerah mengacu pada empat kriteria; (a) keterlibatan pengambilan keputusan, (b) pelayanan public dan sosial, (c) pemerintahan yang transparan, (d) strategi perspektif politik. Sistem

informasi keuangan yang baik akan membantu dalam pengumpulan, penyajian, dan analisis data keuangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang baik. Dalam konteks GRMS, kualitas *sistem informasi e-payment dan e-revenue* menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa data yang tersedia akurat, tepat waktu, dan relevan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan yang mempunyai fungsi sebagai PPKD dan sebagai PD. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi sebagai PPKD adalah menjalankan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Tabel 1 Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

N o	Status Kepegawai an	Lak i- laki	Wani ta	Jumla h (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37	38	75
2	Tenaga Kontrak / OS	228	52	280
Total		265	90	355

Sumber: Data Pegawai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Surabaya 2024

Sedangkan sebagai PD maka tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan pada Perwali

Nomor 89 Tahun 2021, terdiri dari sekretariat, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, bidang Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung didukung 355 personil yang terdiri 75 PNS dan 280 tenaga kontrak.

Dalam hal Government Resource Management System (GRMS), khususnya Pengelolaan Keuangan daerah BPKAD Kota Surabaya bertanggung jawab pada hal proses anggaran, perbendaharaan , dan akuntansi keuangan daerah. Dalam proses penganggaran menggunakan aplikasi *e-budgeting* dan SABK (Sistem Anggaran Berbasis Kinerja), proses perbendaharaan menggunakan aplikasi *e-payment*, *e-revenue*, dan proses akuntansi menggunakan aplikasi *e-inventory* dan *e-accounting*. Sistem informasi *e-payment dan e-revenue* di Kota Surabaya merupakan salah satu inovasi dalam mewujudkan e-government dan membentuk *good governance* yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Wibowo et al., 2023) penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh besar terhadap penatausahaan keuangan daerah, riset tersebut melakukan proses penatausahaan keuangan menggunakan model TAM (Technology Acceptance Model) pada Bappeda Kota Mataram. Riset lain oleh (Ariyanto et al., 2022) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak signifikan terhadap

penatausahaan keuangan daerah untuk mencapai kepuasan pengguna sistem. Riset peneliti lainnya oleh (Safitri et al., 2021) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesuksesan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di kota Jambi. *Novelty* yang terdapat pada penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan terdapat pada objek penelitian ini lebih spesifik menganalisis dan mengkaji sistem informasi *e-payment* dan *e-revenue* yang merupakan salah satu dari sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya dan kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah dengan komitmen pimpinan sebagai variable moderasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mendeskripsikan kualitas sistem informasi *e-payment* dan *e-revenue* dan sumber daya manusia yang kompeten mampu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat menjadi masukan/saran bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki kapasitas kompetensi yang harus dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diamanati (Andrianto & Rahmawati, 2018). Pengelolaan keuangan daerah menggunakan system informasi dan teknologi digital yang membutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan (Nankervis & Cameron,

2023). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN dalam rangka pengembangan karir PNS. Adapun untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia menggunakan indicator sebagai berikut (Siti Cholishshofi et al., 2022); (a) motif, (b) *trait*/sifat diri, (c) Sikap/konsep diri, (d) *Knowledge*/Pengetahuan, (e) *Skill*/Keterampilan. Pengembangan kompetensi SDM adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi, termasuk pemerintah daerah, perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan dapat mencakup peningkatan pengetahuan tentang keuangan daerah, pengembangan keterampilan analisis, dan pemahaman tentang sistem informasi keuangan (Yohamintin et al., 2021).

Sistem Informasi *e-Payment* & *e-Revenue*

Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang semakin canggih pada era zaman modern ini telah mengembangkan model transaksi finansial dengan bentuk baru yang semakin mudah cepat dan tetap aman (Laili, 2014). *E-payment* dan *E-revenue* merupakan dua system informasi yang saling berkaitan, pembayaran elektronik merupakan bentuk dari transaksi finansial yang tidak memerlukan dokumen kertas tertulis, melainkan menggunakan perantara seperti *debit card*, *credit card*, *electronic card*,

e-wallet (Josephine & De Rose, 2017). Penerapan *E-payment* berkaitan erat dengan *e-revenue*, *e-payment* sebagai perantara yang menjadi perantara atau media untuk melakukan transaksi finansial dan *e-revenue* sebagai objek yang akan dihantarkan kepada pihak yang dimaksud. *Revenue* merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dibedakan dari laba keuntungan perusahaan tersebut (Ruebeck, 2018). Istilah pendapatan *income* dan *revenue* memiliki arti yang sama jika diterjemahkan, namun memiliki makna



Gambar 1 Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kota Surabaya
Sumber: Presentasi Aplikasi BPKAD Pemerintah Kota Surabaya

E-revenue merupakan salah satu aplikasi sistem informasi keuangan untuk menunjang penatausahaan keuangan daerah. Menurut (Siringsaengtaksin, 2009) aplikasi *e-revenue* diterapkan oleh Kementerian Thailand untuk pengembangan e-government negara tersebut dalam dekade terakhir. Hasil dari penerapan sistem informasi ini membuktikan hampir 80% pembayaran pajak dilakukan melalui internet pada tahun 2008. Departemen pendapatan Thailand saat ini mencoba untuk memperluas area yang memenuhi kriteria untuk diterapkan *e-revenue*. Inovasi penggunaan sistem informasi tersebut diadaptasi oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk diterapkan dalam lingkungan kerja Pemerintah Kota

Surabaya untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan daerah di Kota Surabaya. *E-payment* adalah sistem layanan pencairan dana APBD secara elektronik terkait pembayaran gaji PNS, pencairan dana pembangunan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa.

Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah, kegiatan pengelolaan keuangan daerah lainnya disebutkan ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Maghfiroh et al., 2023). Penatausahaan ABD ini menjadi langkah mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan yang telah dilaksanakan oleh bendaharawan (Yohamintin et al., 2021). Asas umum penatausahaan keuangan daerah mengatur ketertiban pencatatan, penyimpanan dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, serta verifikasi oleh pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Amin, 2017). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Desilia Tanzerina, 2017).

Variabel Moderasi Komitmen Pimpinan

Kepimpinan merupakan kata benda yang berasal dari kata pemimpin, memiliki makna bimbing, diserap menjadi kata kerja ‘memimpin’ berarti membimbing atau membina. Pemimpin merupakan peran yang dibebankan pada satu orang manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengajak anggota organisasi atau bawahannya untuk sampai pada tujuan organisasi (Azmi, 2024). Kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia, timbullah kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Komitmen pimpinan dapat menjadi variable yang mampu memoderasi kompetensi pegawai dan kualitas SIM e-payment dan e-revenue sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari penatausahaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data empiris dalam skala besar. Tempat penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai lokasi yang relevan dan signifikan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Jumlah pegawai PPK SKPD dan Bendahara Pemerintah Kota Surabaya yang berwewenang untuk mengakses aplikasi

sistem informasi *e-payment* dan *e-revenue* sejumlah 140 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sample menggunakan rumus *Isaac dan Michael* untuk mewakili 140 populasi yang telah ditentukan (Ariola, 2006).

Tabel 2 Populasi Pegawai Bendahara Pemerintah Kota Surabaya

N o	Status Kepegawai an	Lak i- laki	Wani ta	Jumla h (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	46	94	140

Sumber: Data Pegawai Pemerintah Kota Surabaya 2024

Tabel 3 Jumlah Sampel Pegawai Bendahara Pemerintah Kota Surabaya

N o	Status Kepegawai an	Lak i- laki	Wani ta	Jumla h (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28	64	92

Sumber: Data Pegawai Pemerintah Kota Surabaya 2024

Pengambilan jumlah sampel mengacu pada rumus Isaac & Michael dengan ketentuan taraf kesalahan 10% dengan ketentuan *significance level* 10% dan populasi sejumlah 140 orang, maka diambil sejumlah 92 sampel sebagai responden penelitian dari pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penelitian ini.

Analisis data akan menggunakan uji statistik dengan aplikasi SPSS versi 26 yang melalui beberapa tahapan diantaranya; uji validitas dan uji reliabilitas dilanjutkan pada uji prasyarat yang terdiri dari: uji normalitas, uji homogenitas, uji lineritas, uji anova dan uji multikolineritas. Kemudian hasil dari

uji prasyarat akan diinput pada uji regresi hierarki untuk menguji hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

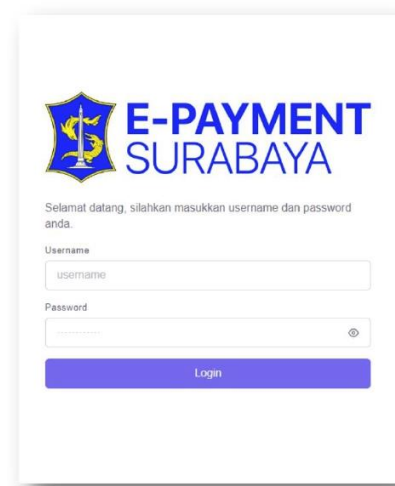
Penerapan sistem informasi *e-payment* dan *e-revenue* merupakan aktualisasi dari *government resource management system* (GRMS) sebagai salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital, dalam riset (Fanida & Niswah, 2015) GRMS merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi seluruh elemen pelayanan pemerintahan mulai dari hulu hingga ke hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Melalui sistem informasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat, penerapan sistem informasi ini telah tercantum dan dianggarkan dalam dokumen Perubahan Renstra BPKAD 2021-2026 Kota Surabaya, pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran serta dukungan teknis teknologi informasi.

Sistem informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (BPKAD) terdiri dari 3 divisi diantaranya; (a) pengelolaan keuangan, (b) pengelolaan aset, (c) umum/sekretariat. Aplikasi *e-payment* merupakan aplikasi sistem layanan pencairan dana APBD secara digital terkait dengan pembayaran gaji PNS, pencairan dana pembangunan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa, fitur dari aplikasi *e-payment* ini

mampu mengintegrasikan seluruh pekerjaan terkait dengan pencairan anggaran karena memiliki fitur; pembuatan SPP, *output* (dokumen SPP), verifikasi SPP, *output* (dokumen hasil verifikasi SPP), pembuatan SPM, *output* (dokumen SPM), otorisasi SPM.

Tujuan dari penggunaan aplikasi untuk mempercepat transaksi pencairan dana APBD Kota Surabaya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan. Aplikasi ini dapat diakses oleh akun pengguna tertentu melalui website dengan syarat ketentuan hanya bagi yang berwenang untuk mengoperasikan aplikasi website tersebut.



Gambar 2 Halaman Login E-Payment Pemerintah Kota Surabaya

Sumber: <https://epayment.surabaya.go.id/2024/>

E-revenue merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses oleh pengguna akun tertentu. Aplikasi Elektronik Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan dan mengoptimalkan proses realisasi penerimaan pendapatan di Surabaya, dengan beberapa fitur yaitu TBP (Tanda

Bukti Pembayaran), TS (Surat Tanda Setoran), laporan Bukti Kas Umum (BKU).

FITUR BARU

Pengembangan Aplikasi E-Revenue 2024



Gambar 2 Fitur Baru Aplikasi E-Revenue

Sumber: Dokumen Presentasi E-Revenue 2024

Penggunaan aplikasi *e-payment* ini berlanjut pada penggunaan aplikasi *e-revenue*, aplikasi *e-revenue* merupakan aplikasi elektornik realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dirancang khusus untuk memudahkan dan mengoptimalkan proses realisasi penerimaan pendapatan di Pemerintah Kota Surabaya, fitur dari aplikasi ini yaitu; mencetak tanda bukti pembayaran (TBP) secara elektronik setelah melakukan pembayaran atas berbagai jenis pajak atau retribusi, mengeluarkan surat tanda setoran sebagai bukti resmi atas penerimaan pendapatan, laporan BKU penerimaan yang dihasilkan oleh aplikasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang total pendapatan yang berhasil direalisasikan dalam periode waktu tertentu.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X1), kualitas SIM e-payment & e-revenue (X2), efektivitas penatausahaan keuangan daerah (Y) dan komitmen pimpinan (M) adalah valid karena;

- Nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ uji validitas dan reliabilitas kompetensi SDM dapat

dikatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas dari keseluruhan variabel didapatkan hasilnya sebesar 0,812. Termasuk kategori Cukup Reliabel

- Nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ uji validitas dan reliabilitas kualitas SIM dapat dikatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas dari keseluruhan variabel didapatkan hasilnya sebesar 0,508. Termasuk kategori Cukup Reliabel
- Nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ uji validitas dan reliabilitas efektivitas penatausahaan keuangan dapat dikatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas dari keseluruhan variabel didapatkan hasilnya sebesar 0,458. Termasuk kategori Cukup Reliabel
- Nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ uji validitas dan reliabilitas komitmen pimpinan dapat dikatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas dari keseluruhan variabel didapatkan hasilnya sebesar 0,407. Termasuk kategori Cukup Reliabel

Hasil Uji Prasyarat

Berdasarkan uji linearitas menggunakan uji anova menghasilkan output deviation from linearity $0,087 > 0,05$ maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilanjutkan pada uji multikolonerotas yang memperoleh hasil nilai toleransi dan VIF di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi yang menghubungkan kualitas sistem informasi e-payments dan e-revenue, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas penatausahaan keuangan. Kemudian lanjut pada uji homoskedastisitas, dimana kualitas sistem informasi e-payments dan e-revenue dan Kompetensi Sumber Daya Manusia nilai $\text{sig} > 0,05$, maka adanya

tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Yang dimana dapat disimpulkan terdapat hubungan homoskedastisitas. Terakhir untuk menguji normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* yang mempunyai nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* menghasilkan 0,074 >0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian ke tahap selanjutnya.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 Uji Auto Korelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.058 ^a	.003	-.019	4.211	2.005

- a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Sistem Informasi *E-payments* dan *E-revenue*
- b. Dependent Variable: Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 9 uji auto korelasi, dimana Nilai Durbin-Watson 2.0 terletak di antara batas bawah (dL) dan batas atas (dU) untuk k = 2 (1.38 dan 2.80). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (tidak ada auto korelasi positif atau negatif pada lag 1). Dengan kata lain, tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada model regresi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi autokorelasi terpenuhi dan model regresi tersebut valid.

Tabel 5 Uji Regresi Moderasi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	59.151	6.661		8.881	.000
Kualitas Sistem Informasi <i>E-payments</i> dan <i>E-revenue</i>	.047	.107	.046	.436	.664
Kompetensi Sumber Daya Manusia	-.025	.068	-.039	-.373	.710

- a. Dependent Variable: Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 10 uji regresi moderasi, diketahui nilai signifikan variabel kualitas sistem informasi *E-payments* dan *E-revenue* sebesar 0,664 (>0,05), maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas sistem informasi *E-payments* dan *E-revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah Sedangkan variabel Kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,710 (>0,05), maka berkesimpulan variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.058 ^a	.003	-.019	4.211	2.005

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Sistem Informasi *E-payments* dan *E-revenue*

b. Dependent Variable: Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Diketahui nilai R square pada tabel Model Summary. Sebesar 0,003, maka memiliki arti bahwa sumbangan Pengaruh variabel Kualitas Sistem Informasi *E-payments* dan *E-revenue* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,3%.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	- 96.997		-.799	.427
	Kualitas Sistem Informasi <i>E-payments</i> dan <i>E-revenue</i>	2.461	1.591	2.411	.126
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.152	.946	.234	.873

Kualitas Sistem Informasi <i>E-payments</i> dan <i>E-revenue</i> *komitmen Pemimpin an	-.041	.027	- 3.157	- 1.522	.132
Kompetensi Sumber Daya Manusia* Komitmen pemimpin an	-.003	.016	-.316	- .195	.846
Komitmen Pimpinan	2.298	1.627	2.256	1.412	.161

a. Dependent Variable: Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Diketahui nilai signifikansi variabel Kualitas Sistem Informasi *E-payments* dan *E-revenue* dengan komitmen pemimpin sebesar 0,132 ($>0,05$), maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi Pengaruh variabel kualitas sistem informasi *E-payment* dan *E-revenue* terhadap variabel Komitmen Pemimpinan. Dan diketahui nilai Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,846 ($>0,05$), maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi Pengaruh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Komitmen Pemimpinan.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.173 ^a	.030	-.025	4.225	1.953

a. Predictors: (Constant), Komitmen Pimpinan, Kualitas Sistem Informasi E-payments dan E-revenue, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Sumber Daya Manusia*Komitmen pemimpin, Kualitas Sistem Informasi E-payments dan E-revenue*komitmen Pemimpin

b. Dependent Variable: Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Diketahui Nilai R square sebesar 0,030 maka memiliki arti bahwa sumbangan Pengaruh variabel Kualitas Sistem Informasi E-payments dan E-revenue dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah setelah adanya variabel moderasi (komitmen pemimpin) sebesar 3%, maka bisa disimpulkan bahwa setelah adanya variabel moderasi (komitmen pemimpin) dapat memperkuat Pengaruh variabel Kualitas Sistem Informasi E-payments dan E-revenue dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Efektivitas Penatausahaan Keuangan Daerah.

Diskusi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, nilai signifikansi untuk variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 0,710 (>0,05). Ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Hal

ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meskipun kompetensi individu penting, efektivitas penatausahaan keuangan mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor sistemik atau struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan peningkatan kompetensi SDM.

Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh sistem informasi yang belum memadai, sehingga walaupun seorang individu dinilai sudah kompeten namun bila sistem informasi yang dipergunakan belum memadai, tentunya hal tersebut berbanding terbalik dengan efektivitas penatausahaan keuangan daerah. Kedua, kemungkinan adanya gap antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga peningkatan kompetensi tidak serta merta meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini besar kemungkinan terjadi misalnya; ketika seorang individu sudah diberikan pelatihan dengan kompetensi A yang sesuai dengan pekerjaan A, namun ketika dijumpai di lapangan individu tersebut harus mengerjakan pekerjaan B, dimana kompetensi B belum didapatkan pada pelatihan sebelumnya.

Nilai signifikansi untuk variabel kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue adalah 0,664 (>0,05), yang menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi ini juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah. Ini dapat menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi E-payment dan E-revenue ada dan digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, mungkin masih dijumpai permasalahan ketika penerapan sistem informasi e-payment

dan e-revenue tersebut dijalankan atau kemungkinan lainnya pengguna tersebut belum beradaptasi sehingga menghambat efektivitasnya faktor lainnya mungkin dapat disebabkan oleh sistem tersebut yang belum sepenuhnya terintegrasi atau dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna, atau mungkin masih ada masalah teknis yang perlu diatasi.

Nilai R square sebesar 0,003 menunjukkan bahwa kombinasi variabel kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue serta kompetensi SDM hanya memberikan kontribusi Pengaruh sebesar 0,3% terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini, baik secara individual maupun bersama-sama, memberikan dampak yang signifikan.

Nilai signifikansi sebesar 0,132 ($>0,05$) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan tidak memoderasi Pengaruh kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya peran aktif pimpinan dalam proses implementasi dan pemantauan sistem informasi tersebut. Meskipun pimpinan memiliki komitmen, tanpa keterlibatan aktif dan pengawasan yang ketat, sistem informasi mungkin tidak digunakan secara efektif.

Nilai signifikansi sebesar 0,846 ($>0,05$) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan juga tidak memoderasi Pengaruh kompetensi SDM terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah. Ini bisa berarti bahwa meskipun pimpinan berkomitmen, faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, kebijakan internal, dan dukungan infrastruktur mungkin lebih berpengaruh terhadap

efektivitas penatausahaan keuangan. Nilai R square sebesar 0,030 setelah memasukkan variabel moderasi (komitmen pimpinan) menunjukkan bahwa Pengaruh variabel kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue serta kompetensi SDM terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah meningkat menjadi 3%. Ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan memberikan kontribusi tambahan, meskipun kecil, terhadap efektivitas penatausahaan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pimpinan tetap penting, meskipun tidak signifikan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah, serta peran moderasi komitmen pimpinan. Meskipun hasil menunjukkan bahwa Pengaruh variabel-variabel tersebut tidak signifikan, tetap ada peluang untuk meningkatkan efektivitas melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya, dan organisasi serupa lainnya, dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan manajemen keuangan daerah. Dengan fokus pada peningkatan kompetensi SDM, pengembangan sistem informasi yang lebih baik, dan komitmen kepemimpinan yang kuat, efektivitas penatausahaan keuangan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Kesimpulan dari penelitian diantaranya;

Kompetensi SDM dan kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi SDM maupun kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah. Setelah adanya komitmen pimpinan, pengaruh variabel kualitas sistem informasi E-payment dan E-revenue serta kompetensi SDM terhadap efektivitas penatausahaan keuangan daerah meningkat sedikit, menunjukkan peran pimpinan tetap penting.

REFERENCES

- Amin, M. (2017). *Memahami Keuangan Daerah*. Indomedia Pustaka.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13756>
- Anggi, ., Basri, Y. M., & Rofika, R. (2021). Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengaruh SAKD, SIMDA, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 1–24. <https://doi.org/10.25170/JAK.V15I1.1371>
- Ariola, M. M. (2006). *Principles and methods of research*. 282.
- Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The Success of Information Systems and Sustainable Information Society: Measuring the Implementation of a Village Financial System. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 3851, 14(7), 3851. <https://doi.org/10.3390/SU14073851>
- Asmorowati, S., Setijaningrum, E., Suaedi, F., & Dewi, Y. F. (2019). Smart Governance in Public Financial Management: A Study of Government Resources Management System (GRMS) in the City of Surabaya. *Iapa Proceedings Conference*, 481–501. <https://doi.org/10.30589/PROCEEDINGS.2019.249>
- Azmi, R. (2024). *Kepemimpinan* - Google Books. Pradina Pustaka. https://www.google.co.id/books/editon/Kepemimpinan/K_X3EAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Fanida, E. H., & Niswah, F. (2015). Government Resource Management System (GRMS): Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1499>
- Hermelinda, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah

- Kabupaten Rejang Lebong). JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 1(2), 18–30.
- Heslina, H., & Syahrini, A. (2021). The Influence of Information Technology, Human Resources Competency and Employee Engagement on Performance of Employees. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 1(1), 01–12. <https://doi.org/10.52970/GRHRM.V1I1.100>
- Josephine, V., & De Rose, L. (2017). A Study on Consumer Preference towards e-Payments. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies Special Issue*, 5(2), 5–9. www.ijarcsms.com
- Kemenkeu, D. J. P. K. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020*.
- Kim, S. H., Guin, L., Pyun, C. S., Guithues, H. J., & Garg, R. (1991). *Financial Administration Theory and Application*. In *Food Policy* (2nd ed., Issue 97). Copley Publishing Group. https://archive.org/details/isbn_0874114659
- Laili, N. A. (2014). Implementasi E-Payment di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Studi Kasus Pencairan Dana kepada Penyedia Barang dan Jasa). *Publika*, 2(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7647>
- Maghfiroh, R. D., Asandimitra, N., & Hartono, U. (2023). Moderation Analysis of Good Corporate Governance on the Effect of Financial Ratio and Market Ratio on Financial Distress. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof.Bus. Rev.*, ISSN 2525-3654, ISSN-e 2525-3654, Vol. 8, No. 7, 2023 (Ejemplar Dedicado a: Continuous Publication; E02568), 8(7), 115. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2933>
- Nankervis, A. R., & Cameron, R. (2023). Capabilities and competencies for digitised human resource management: perspectives from Australian HR professionals. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 61(1), 232–251. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12354>
- Nasution, D. A. D. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. In *Uwais Inspirasi Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Sektor_Publik/HKarXQgrf_oC?hl=en&gbpv=0
- Ruebeck, C. S. (2018). Revenue | Encyclopedia.com. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-and-labor/economics-terms-and-concepts/revenue>
- Safitri, A. R., Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 6(3), 136–148.

<https://doi.org/10.22437/JAKU.V6I3.16111>

Sedyastuti, K., Suwarni, E., Rahadi, D. R., & Handayani, M. A. (2021). Human Resources Competency at Micro, Small and Medium Enterprises in Palembang Songket Industry. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)*, 542, 248–251.

<https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.210413.057>

Siringsaengtaksin, J. (2009). Public Private Partnership: Bridging e-Services Implementation in Remote Area. In *Global E-governance Advancing E-governance Through Innovation and Leadership* (pp. 26–36).

Siti Cholishshofi, N., Bahiroh, E., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Pengembangan Karir Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Jawa Barat Dan Banten (Bjb) Cabang Rangkasbitung. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 15(1), 31–46. <https://doi.org/10.35508/JOM.V15I1.6403>

Syabani Wulandari, B., & Riyanto, G. (2019). Flypaper Effect On Regional Own Source Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), And Revenue Sharing Funds (DBH) Towards Local Expenditures In Solo Raya For The 2012-2016 Period. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 3(03). www.ijeblmr.com

Tanjung, A. H. (2011). Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk

SKPKD dan Pemerintah Daerah (2nd ed.). Salemba Empat. [//e-library.nobel.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D89](http://e-library.nobel.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D89)

Wibowo, D. A., Erlina Sasanti, E., & Mataram, U. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 9(2), 279–287. <https://doi.org/10.32666/TATASEJUT A.V9I2.528>

Yohamintin, Permana, J., Nurdin, D., Suharjuddin, Alkaf, A. H., & Huliatusisa, Y. (2021). Evaluasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Pendidik. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 173–184.